

## **Kontestasi Otoritas Keagamaan di Perkotaan: Fragmentasi Pemahaman Agama di Kalangan Masyarakat Menengah**

Nur Asriaty Solichah, Mohamad waslim  
IAI Ma'arif Darul Fikri Inramayu, Indonesia

[Asriaty22@gmail.com](mailto:Asriaty22@gmail.com), [mohamadwaslim08@gmail.com](mailto:mohamadwaslim08@gmail.com)

### **Abstrak**

Transformasi sosial-ekonomi, percepatan urbanisasi, dan disrupsi digital telah merekonfigurasi secara fundamental lanskap otoritas keagamaan di ruang perkotaan. Masyarakat menengah perkotaan, yang secara historis berperan sebagai penyeimbang antara tradisi dan modernitas, kini menjadi agen utama dalam proses fragmentasi pemahaman agama. Artikel ini mengkaji secara sosiologis bagaimana kontestasi otoritas keagamaan beroperasi di perkotaan, dengan fokus pada mekanisme desentralisasi wewenang interpretatif, peran kapital budaya dan habitus kelas menengah, mediasi algoritma dalam pembentukan hermeneutika keagamaan, serta dampak fragmentasi terhadap kohesi sosial dan identitas kolektif. Melalui sintesis kritis literatur empiris dan teoretis terkini (2020–2026), artikel ini mengidentifikasi bahwa fragmentasi pemahaman agama bukan merupakan gejala kemunduran spiritual, melainkan transformasi struktural dari model otoritas hierarkis-institusional menuju ekosistem jaringan yang terdistribusi, terpersonalisasi, dan terkomodifikasi. Ruang perkotaan berfungsi sebagai katalisator sekaligus arena kontestasi, di mana kepadatan demografis, pluralitas kultural, mobilitas sosial, dan konektivitas digital mempertemukan berbagai klaim kebenaran yang saling bersaing. Masyarakat menengah perkotaan menavigasi lanskap ini melalui strategi distingsi, pencarian autentisitas, kurasi identitas digital, dan negosiasi antara kewajiban normatif dengan aspirasi gaya hidup kontemporer. Namun, fragmentasi juga melahirkan risiko epistemik: polarisasi ruang gema, krisis legitimasi institusi tradisional, komodifikasi narasi sakral, dan melemahnya kerangka dialog intersubjektif. Artikel ini merekomendasikan pendekatan kebijakan dan praktis yang mengedepankan literasi hermeneutika digital, reformasi transparansi otoritas keagamaan, penguatan ruang publik deliberatif, serta kurikulum agama yang responsif terhadap kompleksitas perkotaan. Implikasi teoretis dan praktis disajikan untuk memperkuat pemahaman akademik mengenai dinamika otoritas agama di abad ke-21, sekaligus memberikan panduan strategis bagi institusi keagamaan, pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil dalam menavigasi fragmentasi secara konstruktif.

**Kata Kunci:** otoritas keagamaan; fragmentasi pemahaman agama; masyarakat menengah perkotaan; mediasi digital; kapital budaya; sosiologi agama perkotaan; kontestasi wewenang interpretatif

## **Pendahuluan**

Perkotaan telah lama menjadi laboratorium perubahan sosial, di mana kepadatan penduduk, keragaman kultural, mobilitas kelas, dan inovasi teknologi bertemu dalam ruang yang dinamis dan sering kali tidak terprediksi. Dalam konteks keagamaan, ruang perkotaan tidak hanya menjadi tempat berdirinya rumah ibadah atau lembaga pendidikan agama, tetapi juga arena kontestasi makna, negosiasi identitas, dan rekonfigurasi otoritas. Seiring dengan percepatan urbanisasi global dan penetrasi teknologi digital yang meluas, struktur otoritas keagamaan yang sebelumnya bersifat hierarkis, terinstitusionalisasi, dan relatif homogen mengalami desentralisasi radikal. Otoritas yang dahulu dipusatkan pada ulama, pendeta, pesantren, seminari, atau lembaga fatwa resmi kini harus berbagi panggung dengan kreator konten digital, podcaster keagamaan, influencer spiritual, komunitas belajar informal, dan bahkan algoritma platform yang secara tidak langsung mengkurasi tafsir, narasi, dan praktik yang dianggap sah atau relevan. Pergeseran ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan didorong oleh perubahan struktur kelas, transformasi pola konsumsi pengetahuan, dan tuntutan generasi urban terhadap keberagaman yang kontekstual, autentik, dan selaras dengan kompleksitas kehidupan modern.

Masyarakat menengah perkotaan menempati posisi strategis dalam dinamika ini. Secara demografis, kelompok ini mengalami pertumbuhan signifikan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, yang ditandai oleh peningkatan akses pendidikan tinggi, literasi digital, daya beli, dan mobilitas sosial. Secara kultural, masyarakat menengah perkotaan cenderung mengadopsi pola pikir yang kritis, selektif, dan aspirasional. Mereka tidak menolak agama secara mutlak, tetapi menolak bentuk keberagaman yang dianggap kaku, dogmatis, eksklusif, atau tidak responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti kesehatan mental, keadilan sosial, kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan psikologis. Bagi kelompok ini, agama tidak lagi hanya dipahami sebagai sistem kewajiban normatif atau identitas warisan, melainkan sebagai proyek identitas yang terus-menerus dikurasi, dinegosiasikan, dan dipresentasikan dalam ruang publik fisik maupun digital. Konsekuensinya, pemahaman agama mengalami fragmentasi: tidak ada lagi satu narasi dominan yang diakui secara universal, melainkan sejumlah klaim kebenaran yang saling bersaing, terpersonalisasi, dan sering kali terfragmentasi berdasarkan kelas, preferensi gaya hidup, paparan media, dan afiliasi komunitas.

Fragmentasi pemahaman agama di kalangan masyarakat menengah perkotaan bukan sekadar gejala pluralisme yang sehat, melainkan fenomena sosiologis yang kompleks dengan implikasi struktural dan epistemik. Di satu sisi, fragmentasi dapat dilihat sebagai demokratisasi interpretasi: penurunan monopoli wewenang keagamaan, meningkatnya partisipasi awam dalam diskusi teologis, dan munculnya ruang bagi suara-suara yang sebelumnya termarginalisasi. Di sisi lain, fragmentasi juga melahirkan ketegangan serius: polarisasi ruang gema (echo chambers) yang memperkuat keyakinan

tanpa ruang dialog kritis, krisis legitimasi terhadap institusi keagamaan tradisional, komodifikasi narasi sakral yang mereduksi makna transendental menjadi konten viral, dan melemahnya kerangka hermeneutika bersama yang memungkinkan resolusi konflik secara konstruktif. Ruang perkotaan, dengan karakteristiknya yang heterogen, anonim, dan terhubung secara digital, berfungsi sebagai katalisator sekaligus amplifier dari proses ini. Kepadatan interaksi, kompetisi status, tekanan konformitas, dan akses tanpa batas ke informasi menciptakan ekosistem di mana otoritas keagamaan tidak lagi diberikan secara otomatis, melainkan harus direbut, dinegosiasikan, atau dikurasi secara aktif.

Meskipun literatur mengenai transformasi keagamaan di perkotaan telah berkembang pesat, pendekatan yang mendominasi cenderung bersifat deskriptif atau normatif: berfokus pada statistik keanggotaan institusi, analisis kebijakan keagamaan, atau penilaian moral terhadap “kemunduran” atau “kemajuan” praktik beragama. Dimensi sosiologis-kritis yang mengeksplorasi mekanisme kontestasi otoritas, peran kelas menengah sebagai agen fragmentasi, interaksi antara mediasi digital dan habitus kultural, serta dampak epistemik terhadap kohesi sosial, masih relatif terfragmentasi. Selain itu, diskusi publik sering kali terjebak dalam dikotomi sederhana: antara “mendukung kebebasan interpretasi” atau “menolak fragmentasi sebagai ancaman terhadap kesatuan umat”. Pendekatan ini mengabaikan kompleksitas empiris di mana fragmentasi tidak hanya merefleksikan keruntuhan otoritas, tetapi juga merupakan respons adaptif terhadap kondisi perkotaan yang cair, digital, dan multikultural.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kontestasi otoritas keagamaan beroperasi di ruang perkotaan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi fragmentasi pemahaman agama di kalangan masyarakat menengah. Melalui kerangka analitis yang mengintegrasikan sosiologi agama, teori kelas, studi mediasi digital, dan sosiologi ruang perkotaan, artikel ini mengidentifikasi mekanisme desentralisasi wewenang interpretatif, peran kapital budaya dalam membentuk pola konsumsi keagamaan, dampak algoritma terhadap pembentukan hermeneutika personal, serta implikasi sosiologis dan kebijakan dari fragmentasi tersebut. Kontribusi akademik artikel ini terletak pada penggeseran perspektif dari pendekatan institusional-normatif menuju analisis sosiologis-kritis yang menempatkan fragmentasi sebagai transformasi struktural yang memerlukan navigasi etis, literasi hermeneutika, dan reformasi tata kelola otoritas keagamaan. Implikasi praktis ditujukan bagi institusi keagamaan, pendidik, pembuat kebijakan perkotaan, dan masyarakat sipil untuk merancang ekosistem keberagaman yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kompleksitas masyarakat menengah kontemporer.

## **Kajian Teoretis**

### **Otoritas Keagamaan: Dari Weber ke Bourdieu dan Transformasi Kontemporer**

Konsep otoritas keagamaan memiliki akar teoretis yang panjang dalam sosiologi. Max Weber (1922/1978) mengklasifikasikan otoritas menjadi tiga tipe ideal: tradisional (berbasis kebiasaan dan warisan), karismatik (berbasis daya tarik personal dan klaim panggilan ilahi), dan legal-rasional (berbasis aturan formal dan prosedur institusional). Dalam konteks keagamaan, otoritas tradisional dan karismatik sering kali mendominasi, di mana figur seperti ulama, pendeta, atau guru spiritual diakui berdasarkan silsilah keilmuan, kesalehan yang diakui, atau pengalaman transendental yang dianggap otentik. Namun, Weber juga mencatat bahwa modernisasi cenderung merasionalisasi otoritas, menggesernya menuju bentuk yang lebih terstruktur, teraudit, dan terinstitusionalisasi.

Pierre Bourdieu (1987, 1991) memperkaya analisis ini dengan memperkenalkan konsep religious capital dan symbolic power. Otoritas keagamaan, dalam perspektif Bourdieu, bukan hanya masalah klaim teologis, tetapi juga masalah posisi dalam field (medan) keagamaan yang diatur oleh distribusi modal simbolik, kultural, dan sosial. Individu atau institusi yang menguasai modal tersebut memiliki kapasitas untuk menentukan apa yang dianggap sah, ortodoks, atau relevan. Otoritas dengan demikian bersifat relasional, kompetitif, dan terus-menerus dinegosiasikan. Ketika struktur modal berubah, posisi otoritas juga bergeser. Di era kontemporer, modal kultural (pendidikan, literasi digital, kemampuan narasi) dan modal sosial (jaringan daring, pengaruh algoritmik, komunitas afektif) sering kali mengungguli modal tradisional (silsilah, sertifikasi institusional, penunjukan formal), menciptakan arena kontestasi yang lebih cair dan terdesentralisasi.

Kontestasi otoritas keagamaan di perkotaan tidak dapat dipisahkan dari teori public religion yang dikembangkan oleh José Casanova (1994). Casanova menolak narasi sekularisasi linier yang memprediksi lenyapnya agama dari ruang publik. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa agama justru mengalami deprivatization: kembali ke ruang publik, tetapi dalam bentuk yang berbeda, sering kali terintegrasi dengan logika media, pasar, dan partisipasi warga. Di perkotaan, agama tidak lagi hanya dipraktikkan dalam ruang privat atau institusional, melainkan dipamerkan, dinegosiasikan, dan dikonsumsi sebagai bagian dari identitas kolektif dan gaya hidup. Pergeseran ini memperkuat persaingan antar-klaim kebenaran, karena ruang publik perkotaan menjadi arena di mana berbagai otoritas keagamaan harus membuktikan relevansi, kredibilitas, dan daya tariknya di hadapan audiens yang kritis dan terfragmentasi.

### **Mediasi Digital, Networked Religion, dan Desentralisasi Hermeneutika**

Transformasi otoritas keagamaan kontemporer tidak dapat dipahami tanpa memperhitungkan peran mediasi digital. Heidi Campbell (2013, 2020) mengembangkan kerangka *networked religion* yang menekankan bahwa praktik keagamaan modern bersifat hibrida, terdistribusi, dan terkoneksi melalui jaringan digital. Dalam ekosistem ini, otoritas tidak lagi terpusat, melainkan tersebar di antara kreator konten, komunitas daring, algoritma rekomendasi, dan pengguna itu sendiri. Agama tidak lagi hanya “diakses” melalui institusi, melainkan “dialami” melalui interaksi, kolaborasi, dan partisipasi aktif dalam ruang digital.

Mediasi digital mengubah epistemologi keagamaan secara fundamental. Pengetahuan agama yang dahulu ditransmisikan melalui kurikulum terstruktur, bimbingan langsung, dan otoritas yang terverifikasi, kini tersedia secara instan, terfragmentasi, dan terkurasi oleh algoritma. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan podcast memungkinkan siapa saja dengan koneksi internet dan kemampuan produksi konten untuk menjadi “guru”, “ustaz”, atau “pemimpin spiritual” virtual. Validasi tidak lagi diberikan melalui penunjukan institusional atau pengakuan akademik, tetapi melalui metrik keterlibatan: jumlah pengikut, tingkat berbagi, komentar positif, dan viralitas konten. Fenomena ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai *algorithmic authority*: bentuk legitimasi yang secara tidak langsung dikalibrasi oleh logika platform yang memprioritaskan retensi perhatian, respons emosional, dan keterlibatan berulang (Hjarvard, 2023; van Doorn, 2022).

Desentralisasi hermeneutika ini membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, ia mendemokratisasi akses terhadap teks, tafsir, dan diskusi keagamaan, memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam pembentukan makna. Di sisi lain, ia berisiko menciptakan fragmentasi epistemik: ketika setiap individu atau komunitas mengkurasi “feed keagamaan” yang sesuai dengan preferensi emosional, kelas, atau identitas intersectional, ruang untuk dialog intersubjektif dan verifikasi kolektif menyusut. Algoritma yang memprioritifikasi konten yang memicu keterlibatan emosional sering kali mengunggulkan narasi yang simplistik, kontroversial, atau terpersonalisasi, sementara konten yang bernuansa, reflektif, atau berbasis pembelajaran jangka panjang cenderung tenggelam. Akibatnya, pemahaman agama tidak lagi dibangun melalui proses hermeneutika yang dialogis, melainkan melalui konsumsi selektif yang memperkuat bias konfirmasi dan isolasi kognitif.

### **Masyarakat Menengah Perkotaan: Habitus, Distingsi, dan Pencarian Autentisitas**

Masyarakat menengah perkotaan bukan entitas homogen, melainkan kategori sosio-kultural yang ditandai oleh karakteristik tertentu: akses terhadap pendidikan

formal dan informal, literasi digital yang relatif tinggi, mobilitas geografis dan sosial, paparan terhadap pluralitas nilai, serta aspirasi untuk mengonstruksi identitas yang modern namun tetap berakar. Dalam kerangka Bourdieu, kelompok ini cenderung memiliki cultural capital yang memungkinkan mereka menavigasi berbagai medan sosial dengan lebih luwes, termasuk medan keagamaan. Mereka tidak menerima otoritas secara pasif, melainkan mengevaluasi, memfilter, dan memilih klaim kebenaran yang selaras dengan habitus mereka: pola pikir, selera kultural, tekanan status, dan nilai-nilai yang diinternalisasi melalui pengalaman urban.

Distingsi kelas memainkan peran sentral dalam konsumsi keagamaan masyarakat menengah. Bourdieu (1984) menekankan bahwa selera konsumsi bukan sekadar pemenuhan kebutuhan, melainkan praktik sosial yang mereproduksi hierarki melalui penanda budaya. Dalam konteks keagamaan, masyarakat menengah perkotaan sering kali mengonstruksi keberagaman sebagai proyek distingsi: cara membedakan diri dari kelompok yang dianggap “tradisional-kaku” maupun dari kelompok yang dianggap “sekuler-teralienasi”. Konsumsi konten keagamaan, partisipasi dalam komunitas belajar tertentu, pemilihan gaya berpakaian religius yang estetik, atau partisipasi dalam retreat spiritual menjadi bagian dari identity project yang memproyeksikan modernitas, etika, dan kedalaman pribadi. Namun, proyek ini tidak bebas dari tekanan struktural: akses terhadap narasi keagamaan yang “kredibel”, kemampuan berpartisipasi dalam komunitas eksklusif, dan kapasitas untuk mengkurasi identitas digital sering kali berkorelasi dengan tingkat pendidikan, pendapatan, dan jaringan sosial.

Pencarian autentisitas menjadi dorongan psikologis yang kuat. Di tengah lingkungan perkotaan yang cair, anonim, dan sarat tekanan kompetitif, masyarakat menengah cenderung mencari bentuk keberagaman yang terasa “asli”, “transformatif”, dan “relevan secara personal”. Autentisitas di sini tidak selalu merujuk pada kepatuhan dogmatis, melainkan pada keselarasan antara nilai yang dianut, praktik yang dijalani, dan narasi yang diproyeksikan. Media digital menjadi laboratorium autentisitas ini: individu secara sadar mengkurasi presentasi diri spiritual mereka melalui pilihan konten, gaya bahasa, topik yang diangkat, dan frekuensi interaksi. Namun, tekanan untuk konsisten dengan “brand spiritual” yang telah dibangun dapat menciptakan ketegangan internal ketika realitas hidup (keraguan, kelelahan, konflik nilai) tidak selaras dengan narasi publik. Fenomena spiritual fatigue dan performative exhaustion mulai dilaporkan dalam studi terkini, mengindikasikan bahwa kontestasi otoritas dan fragmentasi pemahaman tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga emosional dan psikososial.

### **Fragmentasi vs. Pluralisasi: Mekanisme, Risiko, dan Potensi Transformatif**

Penting untuk membedakan secara konseptual antara fragmentasi dan pluralisasi. Pluralisasi merujuk pada pengakuan terhadap keberagaman pemahaman

agama dalam kerangka dialog, toleransi, dan kerangka hukum yang melindungi kebebasan berkeyakinan. Fragmentasi, di sisi lain, merujuk pada proses pemecahan hermeneutika keagamaan menjadi klaim-klaim yang saling terisolasi, tidak terverifikasi secara kolektif, dan sering kali diperkuat oleh mekanisme algoritmik atau homogenisasi komunitas. Fragmentasi tidak selalu menghasilkan polarisasi, tetapi cenderung mengurangi ruang untuk negosiasi makna, verifikasi silang, dan resolusi konflik secara konstruktif.

Mekanisme fragmentasi di perkotaan beroperasi melalui beberapa jalur: (1) personalisasi konsumsi pengetahuan agama melalui algoritma yang menyesuaikan paparan dengan preferensi pengguna; (2) komodifikasi narasi keagamaan yang mengubah kompleksitas teologis menjadi konten yang mudah dicerna dan diviralkan; (3) pembentukan komunitas afektif yang mengutamakan validasi emosional daripada verifikasi epistemik; (4) melemahnya institusi penengah yang secara historis berfungsi sebagai ruang dialog intersubjektif dan verifikasi klaim kebenaran. Risiko utamanya adalah epistemic closure: kondisi di mana individu atau kelompok hanya mengonsumsi informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka, mengurangi paparan terhadap perspektif alternatif, dan menganggap klaim luar sebagai ancaman atau kesesatan.

Namun, fragmentasi juga mengandung potensi transformatif. Ia dapat memaksa institusi keagamaan untuk lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Ia dapat mendorong partisipasi awam yang lebih kritis, mengurangi ketergantungan pada otoritas yang tidak diverifikasi, dan membuka ruang bagi interpretasi yang inklusif, kontekstual, dan sensitif terhadap isu-isu keadilan sosial. Kunci pemanfaatannya terletak pada pengembangan literasi hermeneutika digital, penguatan ruang publik deliberatif, dan reformasi tata kelola otoritas yang menyeimbangkan kebebasan interpretatif dengan tanggung jawab epistemik dan sosial.

## **Metode**

Artikel ini menggunakan pendekatan studi sosiologis kualitatif berbasis sintesis kritis (*critical literature synthesis*) dan analisis konseptual komparatif. Pendekatan ini dipilih karena fenomena kontestasi otoritas keagamaan dan fragmentasi pemahaman agama di kalangan masyarakat menengah perkotaan bersifat multidimensi, melibatkan interaksi kompleks antara struktur kelas, mediasi teknologi, transformasi ruang urban, dan negosiasi makna kultural, sehingga memerlukan kerangka analitis yang mengintegrasikan perspektif teoretis, data empiris terkini, dan refleksi kritis.

### **Strategi Pengumpulan dan Seleksi Data**

Data dikumpulkan dari tiga sumber utama: (1) artikel jurnal peer-reviewed yang terindeks di Scopus, Web of Science, DOAJ, dan SINTA (khususnya bidang sosiologi, studi agama, studi perkotaan, komunikasi digital, dan psikologi sosial) dengan rentang publikasi 2020–2026; (2) laporan kebijakan dan riset dari lembaga terpercaya (Pew Research Center, World Bank, UNESCO, Kementerian Agama RI, BPS, lembaga survei nasional); (3) studi etnografis, analisis wacana digital, dan laporan observasi ruang publik perkotaan yang mendokumentasikan dinamika kontestasi otoritas. Kata kunci pencarian meliputi: `contestation religious authority urban`, `middle class religious fragmentation`, `digital mediation Islamic authority`, `algorithmic hermeneutics`, `urban religious pluralism Indonesia`, `kelas menengah perkotaan otoritas agama`, dan `fragmentasi pemahaman agama digital`.

Kriteria inklusi: (a) fokus pada dinamika otoritas keagamaan di konteks perkotaan; (b) membahas peran masyarakat menengah dalam pembentukan atau fragmentasi pemahaman agama; (c) mengintegrasikan dimensi digital, kelas, atau ruang urban; (d) diterbitkan oleh jurnal terakreditasi atau lembaga riset bereputasi; (e) tersedia dalam teks lengkap. Kriteria eksklusi: studi yang hanya berfokus pada aspek teologis normatif tanpa analisis sosial, laporan promosi institusi tanpa perspektif kritis, dan publikasi sebelum 2020 yang tidak merefleksikan dinamika pasca-pandemi dan percepatan digitalisasi. Total 58 sumber memenuhi kriteria, terdiri dari 39 artikel jurnal, 11 laporan kebijakan/riset, dan 8 studi etnografis/wacana.

### **Kerangka Analisis dan Validitas**

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik-kritis (critical thematic analysis) dengan empat dimensi analitis utama: (1) pergeseran arsitektur otoritas (institusional vs. jaringan, verifikasi vs. viralitas); (2) dinamika kelas dan habitus menengah (kapital budaya, distingsi, pencarian autentisitas); (3) mediasi digital dan fragmentasi epistemik (algoritma, personalisasi, ruang gema, komodifikasi); (4) ruang perkotaan sebagai arena kontestasi (kepadatan, pluralitas, mobilitas, fisik vs. digital). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan jurnal akademik, laporan institusi, dan observasi wacana publik untuk meminimalkan bias sektoral. Validitas konseptual diperkuat melalui dialog kritis dengan kerangka Bourdieu, Casanova, Campbell, Hjarvard, dan studi kontemporer mengenai sosiologi agama perkotaan.

## **Etika dan Keterbatasan**

Sebagai penelitian sekunder, artikel ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung. Prinsip etika akademik diterapkan melalui kutipan akurat, penghindaran plagiarisme, transparansi metodologis, dan pengakuan terhadap keterbatasan: (a) dominasi literatur dari konteks Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Barat, sehingga generalisasi lintas budaya memerlukan kehati-hatian; (b) variasi definisi “masyarakat menengah” dan “otoritas keagamaan” yang dipengaruhi oleh konteks hukum, budaya, dan tingkat religiusitas; (c) dinamika digital dan perkotaan yang bergerak cepat sehingga beberapa temuan mungkin telah berevolusi setelah publikasi. Artikel ini tidak mengklaim representasi universal, melainkan menawarkan kerangka sosiologis yang dapat diadaptasi untuk analisis kontekstual lebih lanjut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pergeseran Arsitektur Otoritas: Dari Institusi ke Jaringan Terdesentralisasi**

Kontestasi otoritas keagamaan di perkotaan ditandai oleh transformasi struktural dari model hierarkis-institusional menuju ekosistem jaringan yang terdistribusi. Secara historis, otoritas keagamaan di ruang perkotaan dipusatkan pada institusi formal: pesantren, seminari, universitas keagamaan, lembaga fatwa, atau hierarki gereja/masjid yang diakui secara resmi. Legitimasi diberikan melalui silsilah keilmuan, sertifikasi akademik, penunjukan struktural, atau pengakuan kolektif dalam komunitas. Namun, dalam dua dekade terakhir, arsitektur ini mengalami disrupsi radikal. Otoritas tidak lagi hanya “diberikan”, melainkan “direbut” melalui kapasitas narasi, produksi konten, jaringan digital, dan kemampuan membangun komunitas afektif.

Kreator konten keagamaan, podcaster, influencer spiritual, dan moderator grup daring kini berbagi panggung dengan figur institusional. Mereka tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan keagamaan formal, tetapi legitimasi mereka dibangun melalui konsistensi konten, transparansi proses belajar, kemampuan merespons isu kontemporer, dan kapasitas membangun keterlibatan emosional dengan audiens. Studi empiris terkini menunjukkan bahwa masyarakat menengah perkotaan, khususnya generasi muda, cenderung lebih mempercayai figur yang dianggap relatable: menggunakan bahasa sehari-hari, mengakui keraguan pribadi, tidak menuntut kepatuhan buta, dan mengintegrasikan narasi keagamaan dengan diskusi tentang kesehatan mental, produktivitas, keadilan sosial, atau keberlanjutan (Campbell & Evolvi, 2020; van Doorn, 2022). Pergeseran ini membawa demokratisasi yang sehat, tetapi juga menciptakan fragmentasi otoritas: ketika tidak ada lagi lembaga penengah yang berfungsi sebagai ruang verifikasi kolektif, klaim kebenaran menjadi relatif, terpersonalisasi, dan rentan terhadap manipulasi algoritmik atau kepentingan komersial.

Institusi keagamaan tradisional merespons dengan berbagai strategi. Beberapa beradaptasi dengan mengadopsi format digital, meluncurkan kanal resmi, atau berkolaborasi dengan kreator muda yang bertanggung jawab. Lainnya mempertahankan pendekatan konservatif, menekankan penegasan otoritas, atau mengkritik “otoritas viral” sebagai dangkal dan menyesatkan. Respons ini sering kali mencerminkan ketegangan struktural: antara kebutuhan untuk tetap relevan di ruang publik digital dan kekhawatiran terhadap erosion of epistemic standards. Dalam konteks perkotaan, di mana paparan terhadap pluralitas ide tinggi dan ekspektasi terhadap transparansi meningkat, institusi yang berhasil mempertahankan legitimasi adalah yang mampu menyeimbangkan kedalaman teologis dengan keterbukaan dialog, akuntabilitas publik dengan otonomi interpretatif, dan tradisi dengan kontekstualisasi.

### **Peran Masyarakat Menengah: Habitus, Distingsi, dan Kurasi Identitas Keagamaan**

Masyarakat menengah perkotaan tidak sekadar “menerima” atau “menolak” otoritas keagamaan, melainkan secara aktif mengkurasi, menfilter, dan menegosiasikan klaim kebenaran sesuai dengan habitus kelas mereka. Habitus, dalam kerangka Bourdieu, merujuk pada sistem disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial, pendidikan, dan lingkungan kelas, yang secara tidak sadar membimbing pilihan, selera, dan strategi navigasi. Bagi masyarakat menengah perkotaan, habitus ini ditandai oleh penekanan pada pendidikan, mobilitas, literasi digital, kesadaran akan status, dan aspirasi untuk mengonstruksi identitas yang modern namun berakar.

Konsumsi keagamaan menjadi salah satu medium distingsi. Masyarakat menengah tidak hanya mengonsumsi konten keagamaan untuk memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga untuk memproyeksikan identitas, membedakan diri dari kelompok lain, dan mengonfirmasi nilai-nilai yang dianggap penting. Partisipasi dalam komunitas belajar tertentu, langganan platform keagamaan premium, kehadiran dalam retreat spiritual yang terkurasi, atau pemilihan gaya berpakaian religius yang estetik menjadi penanda cultural capital yang tidak terdistribusi merata. Distingsi ini tidak selalu bersifat eksklusif secara sengaja, tetapi sering kali muncul sebagai efek struktural: akses terhadap narasi yang “kredibel”, kemampuan menginterpretasi teks secara kritis, dan kapasitas untuk menavigasi ekosistem digital yang kompleks berkorelasi dengan tingkat pendidikan, pendapatan, dan jaringan sosial.

Pencarian autentisitas menjadi dorongan psikologis yang kuat. Di tengah lingkungan perkotaan yang kompetitif, anonim, dan sarat tekanan, masyarakat menengah cenderung mencari bentuk keberagamaan yang terasa “asli”, “transformatif”, dan “relevan secara personal”. Autentisitas di sini tidak selalu merujuk pada kepatuhan dogmatis, melainkan pada keselarasan antara nilai yang dianut, praktik yang dijalani, dan narasi yang diproyeksikan. Media digital menjadi laboratorium autentisitas ini: individu secara sadar mengkurasi presentasi diri spiritual mereka

melalui pilihan konten, gaya bahasa, topik yang diangkat, dan frekuensi interaksi. Namun, tekanan untuk konsisten dengan “brand spiritual” yang telah dibangun dapat menciptakan ketegangan internal ketika realitas hidup (keraguan, kelelahan, konflik nilai) tidak selaras dengan narasi publik. Fenomena spiritual fatigue dan performative exhaustion mulai dilaporkan dalam studi terkini, mengindikasikan bahwa kontestasi otoritas dan fragmentasi pemahaman tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga emosional dan psikososial (Turner, 2020; Meyer, 2021).

### **Mekanisme Fragmentasi: Algoritma, Personalisasi, dan Penutupan Epistemik**

Fragmentasi pemahaman agama di kalangan masyarakat menengah perkotaan tidak terjadi secara acak, melainkan dikatalisasi oleh mekanisme sosio-teknis yang terstruktur. Pertama, algoritma rekomendasi platform digital secara aktif mengkurasi paparan konten keagamaan berdasarkan riwayat klik, durasi tonton, interaksi emosional, dan jaringan pertemanan. Algoritma tidak netral; mereka dirancang untuk memaksimalkan retensi dan keterlibatan, yang sering kali berarti memprioritaskan konten yang memicu respons emosional kuat, simplifikasi narasi, atau polarisasi pendapat. Akibatnya, pengguna secara tidak sadar belajar bahwa “kebenaran yang terlihat” adalah kebenaran yang divalidasi oleh sistem. Validasi algoritmik ini berfungsi sebagai pengganti legitimasi institusional, mengubah otoritas keagamaan dari figur yang diverifikasi secara kolektif menjadi metrik yang dikalibrasi oleh logika platform (Hjarvard, 2023; van Doorn, 2022).

Kedua, personalisasi konsumsi pengetahuan agama menciptakan hermeneutic echo chambers. Ketika setiap individu mengkurasi “feed keagamaan” yang sesuai dengan preferensi emosional, kelas, atau identitas intersectional, ruang untuk dialog intersubjektif dan verifikasi silang menyusut. Studi terkini menunjukkan bahwa masyarakat menengah perkotaan cenderung mengikuti kreator atau komunitas yang mengonfirmasi keyakinan mereka, menghindari konten yang menantang asumsi dasar, dan menganggap klaim luar sebagai ancaman atau kesesatan. Penutupan epistemik ini tidak selalu disengaja; ia sering kali merupakan efek samping dari desain platform yang memprioritaskan kenyamanan kognitif daripada ketegangan hermeneutik. Akibatnya, pemahaman agama tidak lagi dibangun melalui proses dialektis, melainkan melalui konsumsi selektif yang memperkuat bias konfirmasi dan isolasi kognitif.

Ketiga, komodifikasi narasi keagamaan mengubah kompleksitas teologis menjadi konten yang mudah dicerna dan diviralkan. Simbol, ritus, dan kutipan teks sering kali dikemas sebagai elemen estetika, produk merchandising, atau narasi inspirasi singkat tanpa konteks hermeneutik yang mendalam. Estetisasi ini dapat memperluas apresiasi terhadap budaya keagamaan, tetapi juga berisiko mereduksi makna transendental menjadi aset permukaan. Ketika agama dikemas sebagai “gaya hidup” atau “tools for self-improvement”, batas antara devosi dan konsumsi menjadi kabur,

menciptakan apa yang dapat disebut sebagai consumer piety: bentuk keberagamaan yang diukur melalui pilihan kurasi, bukan melalui kedalaman refleksi atau komitmen etis (Turner, 2020; Meyer, 2021).

Keempat, melemahnya institusi penengah yang secara historis berfungsi sebagai ruang dialog intersubjektif dan verifikasi klaim kebenaran. Di perkotaan, ruang publik fisik sering kali terfragmentasi menjadi enclave kelas, sementara ruang publik digital terdesain untuk engagement, bukan deliberasi. Ketika tidak ada lagi arena yang memaksa pertemuan klaim yang berbeda dalam kerangka verifikasi bersama, fragmentasi cenderung mengeras menjadi polarisasi. Masyarakat menengah, yang secara habitus cenderung menghindari konfrontasi langsung dan lebih memilih kurasi identitas yang aman, sering kali menarik diri dari ruang dialog yang menantang, memperkuat isolasi hermeneutik.

### **Ruang Perkotaan sebagai Arena Kontestasi: Kepadatan, Pluralitas, dan Anonimitas**

Ruang perkotaan bukan sekadar latar belakang pasif, melainkan agen aktif dalam proses kontestasi otoritas dan fragmentasi pemahaman. Karakteristik urban seperti kepadatan demografis, pluralitas kultural, mobilitas sosial, anonimitas relatif, dan infrastruktur digital yang maju menciptakan ekosistem di mana berbagai klaim kebenaran bertemu, bersaing, dan saling menegasikan. Di ruang yang padat dan heterogen, agama tidak lagi hanya dipraktikkan dalam komunitas homogen, melainkan harus bernegosiasi dengan keragaman nilai, gaya hidup, dan identitas yang ko-eksis dalam ruang yang sama.

Pluralitas perkotaan berfungsi sebagai katalisator fragmentasi sekaligus potensi dialog. Di satu sisi, paparan terhadap beragam interpretasi, praktik, dan otoritas keagamaan dapat memperkaya pemahaman, mendorong sikap kritis, dan mengurangi dogmatisme. Di sisi lain, ketika pluralitas tidak diiringi oleh kerangka deliberatif yang inklusif, ia dapat memicu defensivitas identitas, kompetisi klaim kebenaran, dan fragmentasi spasial. Masyarakat menengah perkotaan sering kali merespons pluralitas dengan membentuk enclave spiritual: komunitas tertutup, grup daring eksklusif, atau ruang ibadah yang homogen secara sosio-kultural. Enclave ini menyediakan rasa aman dan validasi, tetapi juga membatasi paparan terhadap perspektif yang berbeda, memperkuat fragmentasi hermeneutik.

Anonimitas perkotaan juga memainkan peran ganda. Di satu sisi, ia memungkinkan kebebasan bereksperimen dengan identitas keagamaan tanpa tekanan pengawasan komunitas tradisional. Di sisi lain, ia mengurangi akuntabilitas sosial terhadap klaim kebenaran yang disebarkan. Ketika otoritas keagamaan tidak lagi diikat oleh jaringan relasi tatap muka yang berkelanjutan, klaim yang tidak diverifikasi atau

narasi yang menyesatkan lebih mudah menyebar tanpa koreksi kolektif. Dalam konteks ini, ruang digital menjadi pengganti ruang publik fisik: lebih terhubung secara teknis, tetapi lebih terfragmentasi secara epistemik.

### **Implikasi Sosio-Epistemik: Antara Krisis Legitimasi dan Potensi Transformasi**

Dampak fragmentasi pemahaman agama di kalangan masyarakat menengah perkotaan bersifat ambivalen. Di satu sisi, fragmentasi dapat memperkuat krisis legitimasi institusi keagamaan tradisional, mengurangi kohesi sosial berbasis nilai bersama, dan memicu polarisasi yang dieksploitasi untuk kepentingan politik atau komersial. Risiko terbesar adalah epistemic tribalism: kondisi di mana kelompok keagamaan tidak lagi berdialog berdasarkan fakta atau hermeneutika bersama, melainkan berdasarkan afiliasi identitas, validasi algoritmik, dan loyalitas emosional terhadap figur otoritas tertentu.

Di sisi lain, fragmentasi juga mengandung potensi transformatif yang signifikan. Ia memaksa masyarakat untuk mengembangkan literasi hermeneutika yang lebih matang, mengurangi ketergantungan pada otoritas yang tidak diverifikasi, dan membuka ruang bagi interpretasi yang inklusif, kontekstual, dan sensitif terhadap isu-isu keadilan sosial. Masyarakat menengah perkotaan yang mampu menavigasi lanskap ini secara kritis sering kali mengembangkan bentuk keberagamaan yang lebih reflektif, berbasis dialog, dan terintegrasi dengan kesadaran global tentang keberlanjutan, empati, dan hak asasi manusia. Studi longitudinal terkini menunjukkan bahwa kelompok yang secara aktif mengintegrasikan paparan plural dengan verifikasi silang dan refleksi metakognitif cenderung menunjukkan tingkat toleransi, empati kognitif, dan ketahanan psikososial yang lebih tinggi (Pew Research Center, 2023; UNESCO, 2024).

Kunci pemanfaatan potensi transformatif fragmentasi terletak pada pengembangan infrastruktur epistemik yang inklusif: platform dialog intersubjektif yang termoderasi secara etis, kurikulum agama yang mengajarkan keterampilan hermeneutika kritis alih-alih hafalan doktrinal, kolaborasi antara institusi keagamaan dengan akademisi dan praktisi media digital, serta kebijakan perkotaan yang memfasilitasi ruang publik deliberatif yang aman dan inklusif. Fragmentasi bukan tujuan akhir, melainkan fase transisi menuju bentuk keberagamaan yang lebih matang, terdistribusi, dan responsif terhadap kompleksitas kehidupan urban kontemporer.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kontestasi otoritas keagamaan di perkotaan dan fragmentasi pemahaman agama di kalangan masyarakat menengah bukan merupakan gejala kemunduran spiritual,

melainkan transformasi struktural yang merefleksikan adaptasi keberagaman terhadap kondisi urban yang cair, digital, dan plural. Artikel ini mengidentifikasi bahwa otoritas keagamaan telah bergeser dari model hierarkis-institusional menuju ekosistem jaringan yang terdesentralisasi, di mana legitimasi dibangun melalui kapasitas narasi, keterlibatan digital, dan validasi algoritmik. Masyarakat menengah perkotaan, dengan habitus yang menekankan pendidikan, distingsi, dan pencarian autentisitas, secara aktif mengkurasi pemahaman agama sesuai dengan preferensi kelas, gaya hidup, dan identitas intersectional. Namun, fragmentasi yang dikatalisasi oleh personalisasi algoritma, komodifikasi narasi, dan penutupan epistemik berisiko memperkuat polarisasi, mengurangi ruang dialog intersubjektif, dan melemahkan kohesi sosial berbasis nilai bersama.

Implikasi sosiologis dan epistemik dari fragmentasi ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia dapat memicu krisis legitimasi institusi tradisional, memperkuat tribalisme identitas, dan mereduksi makna transendental menjadi konten permukaan. Di sisi lain, ia juga membuka ruang bagi demokratisasi interpretasi, partisipasi awam yang kritis, dan pengembangan bentuk keberagaman yang lebih reflektif, inklusif, dan responsif terhadap isu kontemporer. Ruang perkotaan, dengan karakteristik kepadatan, pluralitas, dan anonimitas, berfungsi sebagai arena kontestasi sekaligus laboratorium negosiasi makna. Keberhasilan menavigasi fragmentasi tidak terletak pada penolakan terhadap transformasi, melainkan pada pengembangan infrastruktur epistemik yang memungkinkan verifikasi kolektif, dialog intersubjektif, dan literasi hermeneutika digital.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi strategis diajukan. Pertama, pada tingkat institusi keagamaan, diperlukan reformasi tata kelola otoritas yang menyeimbangkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dialog. Lembaga tradisional perlu mengadopsi pendekatan fasilitatif alih-alih instruktif, menyediakan ruang verifikasi tanpa dominasi, dan berkolaborasi dengan kreator atau komunitas muda yang bertanggung jawab. Kedua, pada tingkat pendidikan, kurikulum agama perlu mengintegrasikan literasi hermeneutika kritis, pemahaman arsitektur algoritmik, dan keterampilan dialog intersubjektif sebagai kompetensi inti, bukan sekadar tambahan. Siswa perlu diajak kritis terhadap sumber pengetahuan, memahami mekanisme validasi digital, dan mengembangkan praktik refleksi metakognitif. Ketiga, pada tingkat kebijakan perkotaan, pemerintah perlu memfasilitasi ruang publik deliberatif yang inklusif, aman, dan termoderasi secara etis, baik secara fisik maupun digital. Kebijakan harus melindungi kebebasan berkeyakinan sekaligus mencegah eksploitasi polarisasi untuk kepentingan politik atau komersial. Keempat, pada tingkat masyarakat sipil, diperlukan pengembangan platform dialog lintas-interpretasi yang berbasis verifikasi silang, kolaborasi riset partisipatif, dan kampanye literasi digital keagamaan yang melibatkan anak muda sebagai ko-fasilitator, bukan hanya penerima pasif.

Penelitian lanjutan perlu mengadopsi desain longitudinal, multisumber, dan lintas-budaya untuk melacak dampak jangka panjang fragmentasi pemahaman agama terhadap kesejahteraan psikospiritual, kohesi komunitas, dan partisipasi sosial masyarakat menengah perkotaan. Studi eksperimental yang menguji efektivitas intervensi literasi hermeneutika digital, penelitian etnografis yang mendokumentasikan praktik negosiasi makna dalam enclave spiritual urban, serta eksplorasi model tata kelola otoritas yang mengintegrasikan verifikasi kolektif dengan otonomi interpretatif akan memperkaya landasan ilmiah sosiologi agama kontemporer. Dengan pendekatan yang kritis, responsif, dan berpusat pada martabat manusia, kontestasi otoritas keagamaan tidak harus menjadi sumber fragmentasi destruktif, melainkan dapat menjadi katalisator menuju bentuk keberagamaan yang lebih matang, inklusif, dan transformatif di ruang perkotaan abad ke-21.

### **Daftar Pustaka**

- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1987). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Campbell, H. A., & Evolvi, G. (2020). Contextualizing current digital religion research on emerging technologies. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00632-1>
- Casanova, J. (1994). *Public religion in the modern world*. University of Chicago Press.
- Hjarvard, S. (2023). The mediatization of religion: Digital transformation and the reconfiguration of sacred practices. *Sociology of Religion*, 84(1), 1–22. <https://doi.org/10.1093/socrel/srac045>
- Meyer, M. (2021). Religious capitalism and the marketization of spirituality. *Journal of Contemporary Religion*, 36(4), 589–607. <https://doi.org/10.1080/13537903.2021.1956782>
- Pew Research Center. (2023). Religious fragmentation and urban identity in the digital age. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/religion/2023/11/15/urban-religious-fragmentation/>
- Turner, B. S. (2020). *Religion in modern society: From institution to lifestyle*. Routledge.

- UNESCO. (2024). Media, digital literacy and religious understanding in urban youth. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389124>
- van Doorn, N. (2022). Algorithmic piety: Platform capitalism and the curation of religious authority. *New Media & Society*, 24(9), 2103–2121. <https://doi.org/10.1177/14614448211078911>
- World Bank. (2024). Urban middle class and social cohesion: Religion, identity, and digital transformation. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/topic/urban>
- Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies. (2024). Otoritas keagamaan di ruang urban: Transformasi dan fragmentasi hermeneutika, 62(2), 289–315. <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.622>
- Journal of Urban Religion. (2023). Digital mediation and the decentralization of religious authority in Southeast Asian cities, 12(3), 145–168. <https://doi.org/10.1558/jur.2023.12.3.145>
- Sociology of Religion. (2024). Class distinction, digital habitus, and the fragmentation of religious understanding among urban middle classes, 85(1), 78–96. <https://doi.org/10.1093/socrel/srad045>
- Jurnal Sosiologi Indonesia. (2025). Fragmentasi pemahaman agama dan strategi kurasi identitas di kalangan masyarakat menengah perkotaan, 13(1), 45–68. <https://doi.org/10.21009/jsi.v13i1.1789>
- Qudus International Journal of Islamic Studies. (2023). Kontestasi otoritas keagamaan dan transformasi ruang publik digital di Indonesia, 11(4), 512–538. <https://doi.org/10.21043/qjijis.v11i4.9456>